

**POLITIK PERBURUHAN LOKAL DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PHK SEPIHAK: STUDI KASUS PT. TIP TOP DEPOK,
2024–2025**

HAWA SHOFURANI

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika politik perburuhan lokal dalam penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap dua karyawan senior PT. TIP TOP Cabang Depok, anggota SEPAKAT FSBB-KASBI yang diberhentikan pada 25 Februari 2025 berdasarkan klausul pelanggaran berat dalam PKB Ke-V. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, dengan kerangka analisis tripartisme McNaughton dan Lazar (1954) sebagai teori utama, teori politik perburuhan Silver (2003), kerangka *governance* dan hubungan industrial Clark (2000), serta model *advisory* ACAS Towers dan Brown (2000). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anjuran Tertulis Disnaker Nomor 568/92/HI/VIII/2025 ditolak serikat karena kompensasi dinilai jauh di bawah hak pesangon karyawan dengan masa kerja 21 tahun, sementara dua sesi RDP Komisi D DPRD Kota Depok pada 24 September dan 16 Oktober 2025 tidak menghasilkan keputusan mengikat dan dikategorikan sebagai *quasi-konsiliasi simbolis*. Dalam relasi kuasa antar tiga aktor, posisi perusahaan secara konsisten dominan ditopang PKB Ke-V sebagai perisai normatif sementara Disnaker kehilangan kapasitas koersif akibat fragmentasi kewenangan pengawasan pasca-UU No. 23 Tahun 2014, dan DPRD hanya mampu memberikan tekanan moral tanpa kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tripartisme lokal beroperasi sebagai *tripartisme pragmatis lokal* mekanisme tersedia namun tidak menghasilkan keseimbangan kuasa yang nyata akibat desentralisasi asimetris yang secara struktural menghasilkan *defective tripartism*.

Kata Kunci: PHK sepihak, Tripartisme pragmatis lokal, Politik Perburuhan, Relasi kuasa, Pemerintah daerah.

LOCAL LABOR POLITICS IN RESOLVING UNILATERAL LAYOFF DISPUTES: A CASE STUDY OF PT TIP TOP DEPOK, 2024–2025

HAWA SHOFURANI

ABSTRACT

This study analyzes the dynamics of local labor politics in resolving a unilateral termination of employment dispute involving two senior employees of PT. TIP TOP Depok Branch, members of SEPAKAT FSBB-KASBI dismissed on 25 February 2025 based on a serious misconduct clause in PKB. The study employs a qualitative case study approach through in-depth interviews and document analysis, drawing on McNaughton and Lazar's (1954) tripartism theory as the primary framework, Silver's (2003) labor politics theory, Clark's (2000) governance and industrial relations framework, and the ACAS advisory model by Towers and Brown (2000). Findings indicate that Disnaker's Written Recommendation No. 568/92/HI/VIII/2025 was rejected by the union as compensation was deemed substantially below the severance entitlement for employees with 21 years of service, while two Public Hearing sessions by Depok City DPRD Commission D on 24 September and 16 October 2025 produced no binding decisions and are characterized as symbolic quasi-conciliation. In terms of power relations, the company's position was consistently dominant shielded by PKB-V as a normative instrument while Disnaker lost its coercive capacity due to fragmented labor inspection authority under Law No. 23 of 2014, and DPRD could only exert moral pressure without binding legal force. This study concludes that local tripartism operates as *local pragmatic tripartism* mechanisms exist yet no genuine power equilibrium is achieved resulting from asymmetric decentralization that structurally produces *defective tripartism*.

Keywords: Unilateral dismissal, Local pragmatic tripartism, Labor Politics, Power Relations, Local Government.